

2023



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Gatot Subroto VI J Denpasar KodePos : 80237 Telepon/Fax : (0361) 428380
www.denpasarkota.go.id email : kb.denpasarkota@gmail.com

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan Pengelolaan Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2023.

BAB II

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mengacu pada:

1. Misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Pada Tahun 2022 Dinas P3AP2KB menetapkan 1 tujuan terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu;

- a. Tujuan Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan.

IKU Strategis (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG), (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **lampiran 1**.

2) Penetapan konteks operasional Dinas/Badan mengacu pada:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program Perlindungan Perempuan, Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Keluaran/hasil kegiatan Jumlah rapat penyusunan Profil statistik Gender, Penyusunan Profil Statistik Gender, Profil Daerah Responsif Gender, Bimtek penyusunan data terpilah OPD, Penguatan Sistem data Gender dan anak yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

- e. Program Pemenuhan Hak Anak, Kegiatan 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil 1. Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

- f. Program Perlindungan Khusus Anak, Kegiatan (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2) Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Keluaran/hasil (1) Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2)Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; (3)Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat

disajikan dalam **Lampiran 2**.

- g. Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

- h. Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan
1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota
4. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, Keluaran/hasil
1. Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi MKJP , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga kencana dalam rangka penurunan unmetneed,
3. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria
4. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluaran/hasil

Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Dinas P3AP2KB Kota Denpasar memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam **lampiran 3**.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 26 risiko dari populasi.

Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (*controllable*) sebanyak 20 buah dari total risiko strategis pemda dan jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) sebanyak 6 buah dari total risiko strategis dan operasioal pemda.

C. Hasil Analisis Risiko

Dari 26 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko (15,38% dari 26 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Sebanyak 4 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Sebanyak 4 risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 4 risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada **lampiran 7**.

BAB IV

Rancangan Pemantauan

Dari 4 kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam **lampiran 8**.

BAB V
Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat bahwa seluruh risiko yang muncul telah ditindak lanjuti.

Analisis manajemen risiko harus dilaksanakan agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)


Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311199503 2 001

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD


Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	2023		
Periode yang Dinilai	Januari - Desember		
Urusan Pemerintahan	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sumber Data	Renstra Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang		
Sasaran Strategis	(1) Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak (2) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan (3) Meningkatkan Keluarga Berkualitas		
IKU Renstra OPD	No		Target
	1	Predikat Kota Layak Anak	Utama
	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,77
	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,16
	4	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	56,80
Program	<p>Tujuan strategis: 1. Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.</p> <p>Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam</p> <p>IKU Strategis: 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p> <p>Program: 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>		
<p>Denpasar, 3 Januari 2024</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota</p>  <p>Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si Pembina Utama Muda NIP : 19660311 199503 2 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	Januari - Desember	
Urusan Pemerintahan	:	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sumber Data		Renja Tahun 2023	
Tujuan Strategis		(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.	
		(2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang	
Program Dinas P3AP2KB			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	38 orang
	2	Jumlah paket jasa administrasi umum Perangkat daerah	4 paket
	3	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	11 unit
	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan
	5	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 laporan
	6	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	7	Cakupan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	100%
	8	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	9	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	10	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	100%
	11	Pembuatan Profil Statistik Gender	1 buku
	12	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	13	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	14	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	15	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%
	16	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%
17	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	

	18	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%
	19	Cakupan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%
	20	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, Akseptor KB, Tenaga Pelayan KB	100%
	21	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	100%
	22	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%
	23	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Keluaran/ Hasil Kegiatan: 1. Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan 2. Jumlah paket jasa administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan 3. Jumlah barang milik daerah yang disediakan 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 5. Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
	Kegiatan: 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Keluaran/ Hasil Kegiatan: 1. Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah 2. Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 3. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
	Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota		

	<p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Profil Statistik Gender
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota 3. Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: PENGENDALIAN PENDUDUK</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerahKabupaten/kota 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB

	<p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Cakupan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, Akseptor KB , Tenaga Pelayan KB 4. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
<p>Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah <p>Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
<p style="text-align: center;">Denpasar, 3 Januari 2024 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si</u> Pembina Utama Muda NIP : 19660311 199503 2 001</p> </div>	

Nama Perda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Januari-Desember
 Tujuan Strategis : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta menggalakan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang
 Usuan Pemerintahan : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uralan	Risiko		Uralan	Sumber	C/UC	Dampak	
				Kode Risiko	Pemilik				Uralan	Uralan
a	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga									
1	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	IKU Strategis: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Keterlambatan dalam pengumpulan GAP dan GBS	RSO 23.08.13.01	Kepala Dinas P3AP2KB	Kurangnya pemahaman terkait penyusunan GAP/GBS	Eksternal	C	Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kota Denpasar	DP3AP2KB
2		Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point, Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik, Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	Kesulitan dalam menghidupkan peserta	RSO 23.08.13.02	Kepala Dinas P3AP2KB	Karena peserta melupakan ibu rumah tangga dan UMKM, yang memiliki kepentingan lainnya	Eksternal	C	Kehadiran peserta tidak sesuai target dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal	DP3AP2KB

Demasar, 3 Januari 2024
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

 Dra. Kusni Agustina Sitik Wetrawai, M. SI
 Pembina Utama Muda
 NIP : 1960311 199503 2 001

Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Dampak	Pihak yang Terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
1	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan		Kekurangan Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan karena adanya mutasi masuk, deadwal, Serapan anggaran tidak optimal	ROO 23.08.13.01	Kasubag Umum dan Keuangan	Tidak dapat memprediksi mutasi masuk pegawai	Internal		C	Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan gaji dan tunjangan	ASN bersangkutan, Bendahara gaji, Kasubag	
2	Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Jumlah paket jasa administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan		Penyusunan anggaran barang sesuai dengan Rencana Kebutuhan dan	ROO 23.08.13.02	Kasubag Umum dan Keuangan	SPJ Tidak tepat waktu	Internal		C	Penyerapan Timbulan kecil	Kasubag Umum dan Keuangan	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan		Penyusunan anggaran barang elektronik yang belum sesuai dengan Rencana dan	ROO 23.08.13.03	Kasubag Umum dan Keuangan	Penyusunan anggaran barang elektronik daerah belum sesuai dengan Rencana dan	Internal		C	Anggaran Pengadaan barang Milik Daerah tidak dapat direalisasikan	Kasubag Umum dan Keuangan	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		Penyerapan belanja jasa telepon tidak optimal	ROO 23.08.13.04	Kasubag Umum dan Keuangan	Sulitnya memprediksi jasa telepon di balik penyuluh	Internal		C	Anggaran tidak semua dapat terrealisasi	Kasubag Umum dan Keuangan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEREMPUNAN	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO 23.08.13.05	Kasubag Umum dan Keuangan	Umur barang elektronik tersebut sudah melebihi 5 tahun	Internal		C	Pegawai tidak dapat menggunakan barang elektronik tersebut untuk	Kasubag Umum dan Keuangan	
6	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.06	Kabid PHP PKA	peserta memiliki prioritas kegiatan lain (Upacara Keagamaan)	Eksternal		C	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	ASN bersangkutan, Bendahara gaji, Kasubag	
7	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	Cakupan/kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan		Realisasi tidak maksimal	ROO 23.08.13.07	Kepala UPTD PPA	Jumlah kasus yang masuk tidak dapat diprediksi	Eksternal		UC	jumlah anggaran yang direalisasikan tidak bisa berbantuan dengan kasus yang dilaporkan	Kasubag Umum dan Keuangan	
8	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.08	Kabid PHP PKA	Penyusunan anggaran barang elektronik daerah belum sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMD	Eksternal		C	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	Kasubag Umum dan Keuangan	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													

9	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memajukan Kesehatan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam Memajukan Kesehatan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO 23.08.13.09	Kabid KHPKDI	ibu rumah tangga yang memiliki keinginan keluarga, ada dan kepentingan lainnya	Eksternal	C	Kehadiran peserta tidak sesuai target dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal	DP3AP2KB
10	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memajukan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memajukan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO 23.08.13.10	Kabid KHPKDI	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	SPJ Tidak Tepat waktu	DP3AP2KB
11	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pembuatan Profil Statistik Gender	Kesulitan dalam pencarian data	ROO 23.08.13.11	Kabid KHPKDI	Pengumpulan data dari stake holder kurang tepat waktu	Eksternal	C	Proses penyusunan buku profil statistik gender terhambat	DP3AP2KB
12	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonprofit dan Dunia Usaha	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonprofit dan Dunia Usaha	Sulit mengundang kader sebagai peserta	ROO 23.08.13.12		Karena kesulitan dengan pekerjaan utama	Eksternal	C	Peserta yang hadir kurang dari target	DP3AP2KB
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PROGRAM PERLUNDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Berdasarkan Kualitas	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO 23.08.13.13		Terbelur dengan jadwal ujian anak sekolah, dimana kesulitan melibatkan anak.	Eksternal	C	Mundur nya pelaksanaan kegiatan dari rencana	DP3AP2KB
14	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan sekolah	ROO 23.08.13.14	Kabid PHP PKA	terbelur dengan kalender akademik sekolah	Eksternal	C	Pelaksanaan mengikuti kalender akademik sekolah	DP3AP2KB
15	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Realisasi tidak maksimal	ROO 23.08.13.15	Kepala UPTD PPA	Jumlah kasus yang masuk tidak dapat diprediksi	Eksternal	UC	Jumlah anggaran yang direalisasikan tidak bisa diprediksi karena berhubungan dengan kasus yang dilaporkan	DP3AP2KB
16	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.16	Kabid PHP PKA	peserta memiliki prioritas kegiatan lain (Upacara keagamaan)	Eksternal	C	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB
17	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.17	Kabid Daiduk	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacara keagamaan, pelaksanaan lain	eksternal	UC	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB


	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																	
18	Peleaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peleaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.18	Kabid Daiduk	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacra kegamaan, pekerjaan lain , kegiatan lain yang harus	eksternal	UC	peleaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB								
19	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Realisasi tidak maksimal	ROO 23.08.13.19	Kabid Daiduk	Kurang tenaga penggerak desa bapri desa yang tidak memiliki PKB/PLKB (Sesuai Juknis BOKB tahun 2023)	eksternal	C	Kurang optimal penyerapan dana BOKB	DP3AP2KB								
20	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta peleaksanaan pelayanan KB di daerah/kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, Asepior KB, Tenaga Pelayan KB	Data Hasil Pelayanan Belum dimput dalam aplikasi Alat kontrasepsi expired	ROO 23.08.13.20 ROO 23.08.13.21	Kabid KBKKB Kabid KBKKB	Kurang koordinasi antara faskes dan Dinas Kurang optimal pengawasan dari pelugas	Internal Internal	C C	Distribusi Alkon ke faskes terhambat, pelayanan KB tertunda Pelayanan Tertunda	DP3AP2KB DP3AP2KB								
22	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam peleaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam peleaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber KB	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.22	Kabid Daiduk	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacra kegamaan, pekerjaan lain , kegiatan lain yang harus diikuti di waktu bersamaan	eksternal	UC	peleaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAJTERA (KS)																	
23	Kegiatan Peleaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Peleaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga	Peserta belum paham dengan lugas	ROO 23.08.13.23	Kabid KBKKB	Peserta dari berbagai bidang ilmu sehingga pemahaman dalam menyikapi maksud dan tujuan kereadilan belum	Internal	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	DP3AP2KB								
24	Kegiatan Peleaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam peleaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber KB	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 23.08.13.24	Kabid KBKKB	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacra kegamaan, pekerjaan lain , kegiatan lain yang harus diikuti di waktu bersamaan	eksternal	UC	peleaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB								

Depdiknas, 2 Januari 2024
 Kepala Dinas Pembinaan, Perencanaan dan Perlindungan Anak,
 Dra. Yusuf Amalia Sri Wetravati, M. Si
 Rembang Utara Muda
 NIP : 19060314-199503 2 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang						
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
a	b	c	d	e	f	g	
I Risiko Strategis							
II Risiko Operasional							
1	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.23.08.13.11	16	Kabid KHPKKDI	Pengumpulan data dari stake holder terkait, kurang tepat waktu	Proses penyusunan buku profil statistik gender terhambat	
2	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.19	20	Kabid Daiduk	Kurang tenaga penggerak desa bagi desa yang tidak memiliki PKB/PLKB (Sesuai Juknis BOKB tahun 2023)	Kurang optimal penyerapan dana BOKB	
3	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO.23.08.13.20	20	Kabid KBKKK	Kurang koordinasi antara faskes dan Dinas	Distribusi Alkon ke faskes terhambat, pelayanan KB tertunda	
4	Peserta belum paham dengan tugas	ROO.23.08.13.23	16	Kabid KBKKK	Peserta dari berbagai bidang ilmu sehingga pemahaman dalam menyikapi maksud dan tujuan kegiatan belum dipahami	Target kegiatan tidak terpenuhi	

Denpasar, 3 Januari 2024
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian


 Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. : 19660311 199503 2 001

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang						
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Operasional							
1	Kesulitan dalam pencarian data	ROO 23 08 13 11	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dengan penyedia jasa dan stakeholder terkait	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Kabid KHPKKDI	TW I & TW III
2	Realisasi tidak maksimal	ROO 23 08 13 19	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Kabid Dalduk	TW I, TW II, TW III
3	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO 23 08 13 20	Koordinasi dengan faskes dan penginputan rutin dalam aplikasi	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Kabid KBKKK	TW IV
4	Peserta belum paham dengan tugas	ROO 23 08 13 23	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Kabid KBKKK	TW II

Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. SI
Pembina Utama Muda
NIP - 49660311 199503 2 001

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	2023						
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang						
Urusan Pemerintahan	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Operasional							
1	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.23.08.13.11	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dengan penyedia jasa dan stakeholder terkait	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Kabid KHPKKDI	TW I & TW III
2	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.19	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Kabid Dalduk	TW I, TW II, TW III
3	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO.23.08.13.20	Koordinasi dengan faskes dan penginputan rutin dalam aplikasi	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Kabid KBKKK	TW IV
4	Peserta belum paham dengan tugas	ROO.23.08.13.23	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Kabid KBKKK	TW II

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra. Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Rebena Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Pemerintah Kota Denpasar : 2023 (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga, (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Rapat koordinasi, sosialisasi data terpilah	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	OPD yang memiliki data dalam Profil Statistik Gender	TW I dan TW III	TW I (28 Maret 2023); TW III (29 Sept 2023)	Telah terlaksana pada TW III
2	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Rapat koordinasi	BKKBN Provinsi Bali	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	TW I, TW II, TW III	TW I (10 Maret 2023); TW II (4 Mei 2023); TW III (26-26 Sept 2023)	Telah terlaksana pada TW III
3	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Pelatihan Tenaga Medis	Tenaga Medis berpengalaman	Tenaga medis yang melaksanakan pelayanan di faskes	TW IV	TW IV	Workshop CTU tanggal 25-27 Oktober 2023
4	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	Kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	TW II	TW II (17, 19, 22, 29 Mei 2023)	Telah terlaksana pada TW III


Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19560311 199503 2 001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Evaluasi melalui rapat rutin	Kepala Dinas P3AP2KB	TW I dan TW III	TW I (28 Maret 2023); TW III (29 Sept 2023)	Rapat pemenuhan data Pengarustamaan Gender di OPD se-Kota Denpasar
2	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Evaluasi melalui rapat rutin	Kepala Dinas P3AP2KB	TW I, TW II, TW III	TW I (10 Maret 2023); TW II (17 Mei 2023)	Telah terlaksana pada TW II melalui rapat rutin
3	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Evaluasi pelatihan	Kepala Dinas P3AP2KB	TW IV	TW IV (25-27 Oktober 2023)	Telah terlaksana pada TW IV melalui pelatihan MCU/ tenaga medis
4	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Evaluasi pelatihan	Kepala Dinas P3AP2KB	TW II	TW II	Telah terlaksana pada TW II melalui rapat rutin dan dituangkan dalam laporan kegiatan

Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra I Gusti Agung Sri Wetfawati, M. Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19660311-199503 2 001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar									
Tahun Penilaian	: 2023									
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur									
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
2	Masalah/Risiko Baru: NIHIL									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Masalah/Risiko Baru: NIHIL									
III	Risiko Operasional OPD									
	NIHIL									
	Masalah/Risiko Baru:									
	NIHIL									

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar**Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. SI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199503 2 001